



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 9
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Kepala BNPB
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung
Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot
Soebroto, PT 10270
- Acara** : 1. Pembahasan Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan
RKP Tahun 2022 (RKA K/L dan RKP
K-L Tahun 2022);
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA
2020.
3. Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2021.
- Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt.
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 31 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII
DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)
2. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-
PG)
- ANGGOTA:**
FRAKSI PDI PERJUANGAN
3. I Komang Koheri, SE.
4. Ina Ammania
5. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
6. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
7. H. Rachmat Hidayat, S.H.
8. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
9. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
10. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

11. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
12. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
13. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.
14. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, MH

FRAKSI PARTAI GERINDRA

15. M. Husni, S.E., M.M.
16. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
17. Abdul Wachid
18. Drs. H. Zainul Arifin
19. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

20. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMTr.
21. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
22. Hj. Sri Wulan, SE, MM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

23. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag
24. MF. Nurhuda Y.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

25. Drs. H. Achmad, M.Si.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

26. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
27. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

28. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
29. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

30. KH. Muslich Zainal Abidin
31. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pd.I.

- Anggota Izin** : 1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A.
- Undangan** : 2. H. Maman Imanul Haq.
- : Letnan Jenderal Ganip Warsito (Kepala BNPB RI) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.

Yang terhormat para pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia baik yang secara fisik di ruangan Komisi VIII maupun yang hadir melalui virtual. (Karena ini Pak Jenderal Ganip kita batasi Pak. Lebih banyak yang virtual daripada yang hadir sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan DPR).

Mengawali rapat pada hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat hadir mengikuti rapat kerja yang sangat penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Pak Jenderal Ganip kalau biasa di tentara atau di Komisi I ini, berbeda dengan Komisi VIII Mbak Berikan beberapa hari sebelum mengikuti semua rangkaian acara kita mulai dengan doa bersama. Oleh karena itu mari kita berdo'a sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing bagi yang beragama Islam kita baca Ummul Kitab Al Fatihah,

(PESERTA RAPAT BERDO'A)

Selesai.

(BERDO'A SELESAI)

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 8 April 2021 dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 6 Mei 2021, pada hari ini Rabu 2 Juni 2021, Komisi VIII mengadakan Rapat Kerja dengan BNPB dengan acara Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP Tahun 2022 (RKA K/L dan RKP K-L Tahun 2022); Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2020; Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

Kepala BNPB yang saya hormati; dan
Para Anggota dan para Pimpinan yang berbahagia.

Menurut laporan dari sekretariat Komisi fisik hadir 15 anggota virtual 20 anggota dari 9 fraksi, izin 9 anggota. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 251 ayat (1) kuorum sudah tercapai. Izinkan kami kepada Kepala

BNPB dan seluruh Anggota dan Pimpinan kami membuka rapat kerja ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim* dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB.)

Baik, pada hari ini pertama pengantar dari pendapat yang kedua penjelasan dari Kepala BNPB mana Bunda yang sudah saya bacakan tadi. Yang ketiga tentu respon tanya jawab atau masukan dari para anggota tapi kami mohon kan ini pengantar nanti akan kita bahas lebih mendalam dan tadi malam saya berkomunikasi dengan Letnan Jenderal Ganip beliau Jam 12 itu sudah harus meninggalkan ruangan ini karena ada agenda yang sangat penting. Tadi malam sudah iya kan. Karena ini memang pengantar nanti kita kan perdalam tanggal 8 Juni di Wisma Kopo, Puncak. Jadi para anggota nanti mohon maklum bilamana nanti 11.30 lewat atau jam sekarang kita akan mengakhiri rapat ini kita lanjutkan di rapat RDP pendalaman anggaran dengan para Eselon I dan Eselon II BNPB. Yang keempat tentu ada kesimpulan; yang kelima penutup. Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)

Setuju ya? Baik, kita mulai rapat tadi jam 10.20 kita akhiri 11.30 nanti bisa kita spare waktunya 30 menit ya, setuju ya Pak Jenderal?

Sebelum rapat ini kami mulai ingin mengucapkan selamat Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito yang sudah mengemban amanah yang begitu mulia ini sudah menggantikan Pak Doni Monardo. Kami hampir lebih kurang 2 tahun Pak bersama Letnan Jenderal Doni Monardo banyak kenangan hebat luar biasa kerjanya dan kami ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Letnan Jenderal Doni Monardo atas dedikasinya kebersamaannya kekompakannya kepahaman dengan Komisi VIII tentu kami doakan Pak Letnan Doni Monardo supaya sehat terus, sukses terus bilamana ada amanah kembali di tempat yang lain dan kami tetap Pak Letnan Jenderal Doni Monardo, juga tetap di hati kami, Pak. Salam kepada Pak Letnan Jenderal Doni Monardo. Karena itu kami ucapkan selamat datang di Komisi VIII Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito. Selamat bergabung Pak dengan mitra Komisi VIII.

Komisi VIII itu komisi dunia akhirat Pak. Jadi insya Allah nyaman lah Pak Jenderal sini ya? Apalagi saya sudah pantau begitu gesitnya Pak Letnan Jenderal Ganip setelah dilantik langsung ke Wisma Atlet dan saya pantau terus. Artinya komitmen untuk meneruskan kerja-kerja Pak Letnan Jenderal Doni Monardo itu saya kira bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan karena kita pantau juga memang Pak Ganip ditakdirkan katanya selalu menggantikan Pak Doni Monardo. Ya mungkin itu pak ya? Jadi kami ucapkan selamat kami siap bekerja sama siap mendukung siap semuanya demi merah putih Pak Letnan Jenderal. Intinya terbuka saya dengan Komisi VIII Pak secara formal boleh secara informal juga boleh Pak karena kita bertugas sama-sama disumpah dibawa sumpah oleh negara ini untuk mengemban amanat yang begitu banyak demi bangsa dan negara yaitu rakyat Indonesia yang sangat kita cintai.

Oleh karena itu nanti kami mohon Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito ini digabungkan namanya ini ya? Untuk memperkenalkan lebih lanjut nanti Pak ya, istrinya berapa coba ya. Ya satu itu ada hitungannya juga ya ada hitungannya Pak Samsu Niang. Oleh karena itu nanti kita bangun kekompakan lapak di Komisi VIII ini karena negara ini memang sebagai supermarket kata Pak Doni lebih sumur market bencana apa maka kekompakan adalah modal dasar kita. Maka sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung di Komisi VII, kami sebagai pimpinan sebagai anggota bangga senang bisa bersama-sama dengan Letnan Jenderal Ganip Warsito dan.

Sebelum kami melanjutkan kata pengantar kami kenalkan dulu Pak nanti walaupun hati sambil bertanya bisa memperkenalkan tapi kami kenalkan secara sekilas Pak Ganip di samping kanan dan samping kiri saya ini pimpinan yang paling cantik Pak karena diantara 5 pimpinan ini satu-satunya perempuan ini Ibu Dia Pitaloka dari partai penguasa di PDIP Pak ya dapilnya Jabar III ya? Kabupaten oh Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur yang dekat dan Cianjur banyak bencana Pak. Kemudian dari mana dulu ini? Ada di samping kiri itu yang ngetik Loh ini Pak Samsu Niang *nih* penghuni lama nih pak, belum tereliminir. Pak Samsu Niang dari PDIP Dapil Sulsel 2 ya banyak kabupatennya itu ya 9 ya. Kemudian di belakangnya ada Ibu Itje dari Jabar 9 ya Jabar 9 dari Golkar ini. Pak Muhammad Rizal dari PAN Dapil Banten 3 Tangerang Raya. Kemudian Pak Husni ini Sumut 1 Pak dari Gerindra orang Aceh tapi nggak tahu aja itunya Pak Husni ini. Ini Ibu Hajah Lisda dari NasDem Dapil Sumbar 1 tapi suaranya banyak di pesisir selatan karena suaminya Bupati Pak. Ini Pak Jefri Romdonny ini alumni Gontor Pak, Jabar 9 ya dari Gerindra ini Pak Hasan Basri HBA apa mantan Gubernur Jambi dari Golkar. Kemudian Pak, siapa? Oh iya biasanya duduknya disana ini Nurhuda dari PKB yang menggantikan Menteri Agama. Ini Pak Kyai Muslich dari PPP dari Dapil Jateng III. Kemudian ibu Wulan dari NasDem Dapil Jateng III. Saya kira itu yang secara virtual saya tahu nanti alam gaib Pak jadi saya enggak kelihatan Pak. Saya kira itu Pak itu Pak Ganip untuk lebih dekat nya kita pasti banyak pertemuan, apakah itu FGD kemudian rapat-rapat di sini maupun di luar Pak. Oh iya ini Pak Marwan Dassopang ini dari Sumut 3 ya cuma 12 kabupaten/kota dari PKB Pak masih ada yang belum diproses nantinya dikenalkan.

Baik, Pak Kepala BNPB beserta seluruh jajaran para anggota tadi sudah saya kenalkan. Maka pada hari ini Sekali lagi kami menyampaikan rapat ini sangat strategis pada pagi hari ini karena menyangkut pembahasan Pendahuluan RAPBN Tahun 2022 ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa salah satu ruang lingkup tugas komisi di bidang anggaran adalah

mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan pemerintah.

Sebelum kami mempersilakan Kepala BNPB untuk menyampaikan paparannya, kami ingin menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR RI selama ini sangat mendukung berbagai program dan anggaran yang diperlukan oleh BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia, baik pada masa pra bencana, darurat bencana, maupun pasca bencana. Jadi sekali lagi Pak Jenderal Ganip kami sangat mendukung penuh apa namanya keperluan-keperluan dari BNPB bilamana perlu persetujuan dari Komisi VIII.

Namun demikian kami masih perlu menyoroti beberapa hal yang terkait dengan anggaran di lingkungan BNPB:

Pertama, pengelolaan dana siap pakai belum disampaikan secara rinci dan transparan padahal Komisi VIII DPR RI selalu memberikan persetujuan untuk penambahan anggaran misalnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB tanggal 22 Maret 2021 dapat memahami penambahan anggaran dana siap pakai tahun 2021 sebesar 2 triliun tetapi laporan rinci mengenai penggunaan DSP tersebut tahun 2019, 11,8 triliun belum seluruhnya disampaikan. Jadi sekali lagi Pak kalau ada penambahan karena kami sadar bencana itu tidak bisa ditunda. Jadi kami selalu tidak pernah menghambat kerja-kerja dari BNPB. Tapi penting, karena itu bertanya kepada rakyat laporannya kepada Komisi VIII saya kira ke depan perlu kita transparan dalam hal penggunaan anggaran.

Kedua, BNPB masih memiliki tunggakan kepada sejumlah vendor dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan 2020 sebesar 1,3 Triliun dan ini sudah kita bahas secara mendalam waktu rapat kerja dengan BNPB yang tanggal 20 Maret itu kita minta Menteri Keuangan kalau bilamana persyaratan dari BNPB sudah ada segera dibayarkan karena itu menyangkut *trust* menyangkut kerjasama selama ini terhadap pihak.

Ketiga, proses rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sejumlah daerah yang terkena bencana masih tersendat akibat kondisi keuangan pemerintah yang kini mengalami defisit anggaran. Dalam hal ini mendorong agar BNPB menetapkan skala prioritas dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kemampuan antara negara.

Keempat, untuk kelembagaan BNPB Komisi VIII DPR RI tetap berpegang teguh pada Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang menjadi hak inisiatif DPR bahwa nomenklatur BNPB disebutkan secara eksplisit dan rigid dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk itu Komisi VIII -nah ini mungkin Pak Jenderal Ganip, nah ini Pak Ace Hasan Syadzily dari Golkar sebagai ketua Panja DPR yang rawan bencana sampai hari Senin deadlock deadlock antara DPR sama pemerintah. Dua saja Pak, tapi yang lebih kami tekankan itu adalah nomenklatur BNPB dimana pemerintah melalui *leading* sektornya Kemensos itu ingin BNPB dihapuskan. Sementara tidak ada

satupun dari Komsis VIII menginginkan itu Pak. Kami semangat kami menginisiasi Revisi Undang-Undang Nomor 24 itu adalah dalam rangka memperkuat, memperteguh baik dari sisi kelembagaan koordinasi dan keuangan Pak. Oleh karena itu bilamana ada celah-celah untuk memperlemah BNPB tentu semua fraksi di Komisi VIII sepakat juga kan tidak bicarakan secara baik-baik Pemerintah Pak. Oleh karena itu bilamana nanti Pak Jenderal Ganip Warsito ini sudah banyak Bapak masukkan tapi ini kuncinya dibawa Presiden Jokowi Pak. Kalau bisa mungkin ada komunikasi langsung atau konsultasi sehingga Kami yakin dengan pelantikan Pak Ganip ini artinya pemerintah memang masih membutuhkan BNPB Pak. Maka bilamana itu bertolak belakang dengan pembahasan undang-undang saya kira sangat kita sayangkan Pak Jenderal Ganip maka kami mohon bilamana ada senang waktu bisa mendapat izin Pak sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Bencana ini yang intinya memperkuat BNPB mandatory budgeting kemudian koordinasi diperkuat apa jangkauan BNPB ke dari semakin kokoh itu semangat undang-undang ini kita revisi Pak. Bilamana itu memperlemah segala gitu misal 8 tentu tidak setuju.

Nah atas dasar permasalahan keuangan yang telah disebutkan diatas maka kami ingin mengkonfirmasi kepada Pak Kepala BNPB yang pertama berapa rancangan dalam BNPB tahun 2022 dan program prioritas apa saja? Yang kedua Bagaimana dengan target yang hendak dicapai oleh BNPB Tahun 2022 dan apa saja yang sudah dikerjakan? Ketiga Bagaimana dengan laporan rinci mengenai penggunaan di DSP tahun 2020 dan tunggakan menyelesaikan kebakaran hutan tahun 2020 yang saya sebutkan tadi sebesar 1,3 Triliun.

Saya kira itu Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito. Tadi saya gabung Pak, Pak Ganip tadi karena Pak Ace belum datang. Pengantar dari kami sekali lagi kami senang dan bahagia bisa bekerjasama dengan Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito, mudah-mudahan awal yang baik kita diakhiri juga dengan baik nanti pak dan insya Allah dan hasil yang baik maka kami persilahkan dengan hormat kepada Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito untuk menyampaikan paparannya kami persilahkan Pak.

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat pimpinan rapat beserta segenap anggota Komisi VIII DPR RI.
Yang terhormat dan hadirin sekalian yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir di ruangan yang sangat terhormat ini untuk melaksanakan rapat kerja dengan para pimpinan Komisi VIII DPR RI. Sebelum saya melaporkan tentang agenda atau sesuai arahan pimpinan tadi terlebih dahulu izin untuk memperkenalkan diri. Saya Letnan Jenderal TNI

Ganip Warsito. Banyak orang yang salah nama saya Pak kamu itu susah tapi kalau mau mengingat nama saya cukup ingat di antara ganjil dan genap itulah Ganip Pak. Saya anak nomor 3 Pak, dari tiga bersaudara, keluarga TNI, bapak saya terakhir di TNI berpangkat kapten.

Mohon izin dulu Kapten itu di daerah sudah hebat Pak. Karena di kota kecil dilahirkan di Magelang 57 Tahun yang lalu. Dan saat ini saya berkeluarga Pak. Kalau tadi Pak Pimpinan mengatakan istrinya ada berapa. Sekarang lagi ramai dengan istilah Pak is one three, s four dan sedang berkembang lagi istilah poligami dan policountry Pak. Jadi kalau tidak boleh nikah di dalam negeri ya nikah di luar negeri, polycountry. *Alhamdulillah* Pak saya di sumpah dan janji untuk istri satu, dan sudah diberikan beban 3 orang putra. *Alhamdulillah* yang pertama sudah menikah dengan seorang prajurit, dan dua orang saya kebetulan tidak ada yang mengikuti jejak saya Pak. Biasanya kalau anak perempuan yang pertama ini kan jatuh cintanya yang pertama adalah orang tuanya ke bapaknya. Putri pertama itu jatuh cinta pertama dengan ayahnya dia ingin cari figur seperti seperti ayahnya. Dan *alhamdulillah* keturunan suaminya tentara dan perpaduan yang harmonis antara Garut ke Magelang Pak. Jadi yang dapil Jawa Barat mohon izin titip Bu.

Kemudian saya menyampaikan, saya Akademi Militer 1986 Pak. Jadi satu tahun di bawah Pak Doni Monardo dan memang benar Pak Doni Monardo adalah mentor saya Pak sejak taruna kebetulan di drumband Sangka Lokananta dan ketiga itu saya serah terima kelompok komandonya juga dengan Pak Doni. *Alhamdulillah* berlanjut sampai dengan saya menjadi komandan Batalyon Yonif 741 di Singaraja Bali. Itu saya terima juga dengan Pak Doni. Saya pernah katakan dengan teman-teman di BNPB bahwa mengganti Pak Doni itu memang berat Pak. Saya sudah rasakan dua kali dan ini yang ketiga kali. Tapi Insya Allah dengan niat saya yang tulus dan ikhlas untuk bekerja demi bangsa dan negara selalu aja ada jalan dan dengan dukungan dan kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu di Komisi VIII ini saya percaya diri tugas-tugas saya dapat terlaksana dengan baik juga. Mohon sekali lagi dukungan dan kerjasama serta arahnya sehingga tugas BNPB yang demikian mulia ini bisa kita sama-sama laksanakan dengan baik.

Sehingga saya menyampaikan kepada jajaran saya untuk memegang satu prinsip bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tulus, profesional dan terhormat. Maksud saya saya di sini adalah tulus ini adalah kita tidak mengharap imbalan dari manapun dalam arti dari itu memang janji kita ikhlas itu hanya mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan profesional sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab kita kerjakan, dan terhormat inilah yang paling penting buat saya, saya bangga dan terhormat dengan baju rompi BNPB ini Pak.

Mudah-mudahan inilah yang akan memotivasi saya untuk lebih lagi meningkatkan pengabdian saya saya dan janji saya untuk bangsa dan negara. Ini sekilas untuk perkenalan saya. Mungkin ke depan kita masih banyak akan kerjakan bersama dan perkenalan selanjutnya nanti sambil berjalan Pak.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati.

Saya ingin melaporkan sesuai dengan agenda pembahasan hari ini. Yang ingin kami laporkan adalah mengenai data bencana di Indonesia tahun 2021. Ini sebagai pengantar Pak bahwa begitu seringnya di negara kita ini mengalami bencana. Yang mungkin dikatakan Pak Doni beberapa pakar mengatakan supermarket bencana sehingga bencana itu pasti kalau perang itu mungkin. Artinya kita harus betul-betul mensiasati dan mengatur strategi yang tepat untuk menghadapi bencana ini. Baik dari proses pra bencana, bencana dan paska bencana.

Sampai dengan 1 Juni 2001 mencatat ada 1364 kejadian bencana baik itu bencana hidrometeorologi yang mendominasi antara lain bencana banjir yang menempati urutan pertama, dan diikuti oleh puting beliung dan tanah longsor. Bencana yang menimbulkan dampak terhadap penduduk dan pengungsi mencapai angka 5,3 juta merenggut 2493 dia meninggal dunia serta 12.831 jiwa luka-luka.

Kami juga laporkan perkembangan situasi Covid-19 di Indonesia. Tercatat kasus Covid-19 sebanyak 101.325 kasus kemudian angka kesembuhan sebanyak 1.674.479 kasus sedangkan angka kematian sebanyak 50.723 kasus. Dua minggu terakhir ini kasus Covid memang mengalami peningkatan tapi kita berupaya untuk terus melakukan tindakan-tindakan ataupun antisipasi dan gejolak peningkatan Covid-19. Saat ini program vaksinasi Covid-19 vaksin sangat penting dilakukan pemutusan rantai penularan virus Covid-19 dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk masyarakat serta membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Kami sampaikan perkembangan pelaksanaan vaksin Covid-19 sampai saat ini dengan target sasaran 40,3 juta orang telah dilaksanakan persatu sebanyak 16,59 juta orang dan vaksin kedua sebanyak 10,7 juta orang.

Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun 2022 dengan mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S 3610 MK 02 2021 dan Nomor B 238 MPPND 8 BP 02042011 tanggal 29 April 2001 tentang pagu indikatif belanja KL Tahun 2022 yang menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 sebesar Rp.1.127.245.197.000. Pagu indikatif tahun 2022 dirumuskan dalam program sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.318.799.834.000

- b. Yang kedua, program ketahanan bencana untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.808.445.363.000 dimana di dalamnya sudah termasuk anggaran dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar 250 miliar.

Kemudian surat Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas B 456 KABNPBPR0525 2021 tanggal 12 Mei 2021

tentang perubahan rincian pagu perprogram pagu indikatif BNPB tahun 2022 kami mengajukan perubahan rincian pagu per program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar 289.010.347.000.
2. Program ketahanan bencana untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 838.234.850.000.

Selanjutnya pergeseran anggaran tersebut sudah dibahas dalam pertemuan tiga pihak antara BNPB, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait rencana kerja pemerintah Tahun 2022 dan pagu indikatif dan BNPB tahun anggaran 2022 pada tanggal 19-20 Mei 2021 dan tanggal 27 dan 28 Mei 2021.

Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat.

Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tadi diminta oleh pimpinan kami laporkan bahwa capaian pelaksanaan kegiatan prioritas nasional tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan simulasi PB di daerah dilaksanakan di 19 lokasi.
2. Yang kedua desa tangguh bencana di 120 lokasi.
3. Layanan pemulihan pasca bencana bidang sosial ekonomi dan sumber daya alam di 18 lokasi.
4. Layanan pendampingan pemulihan pasca bencana bidang fisik dilaksanakan di 6 lokasi.
5. Pendampingan penanganan korban dan pengungsi untuk 570 orang.
6. Sistem komando penanganan darurat bencana dan keposkoan untuk 105 orang.
7. Pendampingan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk 120 personel.
8. Layanan budaya sadar bencana dilaksanakan di 81 lokasi.
9. Literasi kebencanaan dilaksanakan di 43 lokasi.
10. Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 144 lokasi.
11. Satuan pendidikan aman dari bencana atau SPAB di 8 lokasi.
12. Pengelolaan infrastruktur darurat untuk 100 personil;
13. dan yang ke-13 sistem peringatan dini dilaksanakan di 6 lokasi.

Kemudian dari segi evaluasi anggaran tahun 2020, kami laporkan bahwa total anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp. 12.712.583.693.000. dari total anggaran tahun 2020 tersebut anggaran sebesar Rp.11.818.453.584.665 atau sebesar 92,97% dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.215.174.419.000 dengan realisasi sebesar Rp.213.632.540.000 atau 99,28%.
2. Yang kedua program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB dengan pagu sebesar Rp.8.924.900.000 dengan realisasi sebesar Rp.8.892. 827.590 atau 99,64%.
3. Yang ketiga program penanggulangan bencana dengan praktis sebesar Rp.12.488.484.374.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.595. 928.216.841 atau 92,85%.

Kami laporkan juga sebagai catatan dapat kami sampaikan sebagai berikut paguawal BNPB sebesar Rp.700.646.814.000 sudah termasuk dana siap pakai sebesar 250 miliar. Tambahan dana siap pakai untuk bencana alam sebesar 1,8 triliun. Tiga, tambahan dana siap pakai untuk penanganan Covid-19 sebesar 10,09 triliun. Kami sampaikan bahwa nilai kinerja dan anggaran kinerja pelaksanaan anggaran BNPB tahun 2020 memperoleh nilai 91,18 atau dengan predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan.

Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat.

Selanjutnya kami sampaikan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Pagu awal BNPB sebesar Rp.813.103.749.000 sudah termasuk di DSP sebesar 250 miliar. Kemudian terdapat anggaran tambahan dari di DSP bencana alam Rp.1.753.559.480.000. Tambahan penanganan DSP penanganan Covid-19 sebesar Rp.858.713.783.000. Dari dana hibah sebesar Rp.1.651.455.000 sehingga sampai dengan awal bulan Juni ini pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.427.028.467.000.

Selanjutnya anggaran BNPB tahun 2021 dirumuskan ke dalam program sebagai berikut:

1. Untuk program ketahanan bencana. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.146.511.626.000.
2. Program dukungan manajemen dan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.280.516.841.000.

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut sampai akhir bulan Mei 2021 ini sudah terserap anggaran sebesar Rp.977.966.863.499 atau sebesar 28,54% dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Program ketahanan bencana dengan pagu sebesar Rp.3.146.511.626.000 dengan realisasi sebesar Rp.901.770.953.553 atau sebesar 28,66%.
2. Program dukungan manajemen dengan pagu sebesar Rp.280.516.841.000 dengan Real jadi sebesar Rp.76.195.909.946 atau 27,16%.

Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat

Demikian penjelasan mengenai rencana kerja BNPB Tahun 2022 dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2020 serta evaluasi kinerja Tahun 2021. Apabila ada hal-hal yang perlu di pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Shanti Shanti Shanti.*

Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarrakatuh.

Terima kasih Pak Kepala BNPB atas penjelasannya pada pagi hari ini. Kita senang mendengarnya biasanya di bawah 1 triliun Pak yang dari Kementerian Keuangan hari ini 1,1 lebih itu artinya suara kita di Komisi VIII didengar oleh Menteri Keuangan Pak. Kemudian dari tahun 2020 sangat baik 91,18% ini kalau bisa dipertahankan Pak. Karena tahun 2021 sedang berjalan baru 28,54% arti nya masih ada 72,46% yang berserap. Ini sudah bulan Juni ya. Tapi biasa lalau pembayaran itu di akhir tahun Pak di Oktober, November itu biasanya dikebut ya.

Baik, Bapak Ibu ini bertambah lagi Pak biasanya enggak seramai ini datangnya ini mungkin karena kepala DP baru kali ini ada Pak Arwan Aras Pak dari PDIP Dapilnya Sulbar karena Sulbarcuma satu. Ini Pak Rudi Hartono dari NasDem Sumut 2 eh Sumut 3 dari NasDem. Ini ada Ibu Ina Ammania nih dari PDIP Jatim VII. Pacitan itu ya? Pacitan dan kawan-kawan kemudian Pak Wahid, Pak Abdul Wahid dari Gerindra. Dulu Pak Wahid tantara bukan? Gerindra banyak tentaranya dari Jateng II. Kemudian Pak Pak Ahmad ini dari Demokrat Pak. Demokratnya Pak AHY ini dari Riau I. Belum ada yang dikenalkan. Pak Ace tadi sudah ya dari Golkar Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Tapi ini orang Pandegelang. Aneh juga ini. Ya sama saya juga orang Bengkulu Lampung dan Banten terus jadi ini biasa. Kemudian Kyai Maman ini belum dikenalkan juga tadi sudah kenal dengan Pak GaniP, dari PKB Pak Dapil Jabar 9 ya Subang dan kawan-kawan.

Baik, tadi sebagaimana saya sampaikan ini pengantar dari Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito tentang Anggaran Tahun 2022 nanti kita akan bahas secara mendalam di Wisma Kopusudah diagendakan oleh pimpinan tanggal 7 tanggal 8 tanggal 9. Setahu saya BNPB di tanggal tanggal 8? Tanggal 8 bersama seluruh Eselon 1 dan Eselon 2 supaya ada pendalaman yang lebih serius sebelum kita setuju secara bersama-sama di Komisi VIII maupun di badan anggaran besar nanti. Tapi masih ada waktu sekitar setengah jam kita manfaatkan mungkin ada dari meja pimpinan atau dari para anggota, sudah

cukup? Dari anggota ada yang mau sampaikan? Tapi sekali lagi masalah materi nanti juga akan dibahas di Kopo ya. Silakan Pak Wachid.

F- P. GERINDRA (ABDUL WACHID):

Ya terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati dan wakil Pimpinan juga Kepala BNPB.

Dari Pak Ganip terutama selamat atas dilantiknya ketua BNPB.

KETUA RAPAT:

Bukan ketua Pak. Kepala.

F- P. GERINDRA (ABDUL WACHID):

Pak Kepala BNPB dan dengan Bangga memakai rompi BNPB. Sedikit Pak ini saya sampaikan karena ini sifatnya adalah urgent sekali saya Dapil 2 Jawa Tengah (Demak, Kudus, Jepara). Perlu kami sampaikan ini di Kudus Pak ini lagi benar-benar hitam sekali Pak. Covid ini Pak. Jadi saya perjalanan dari sini tadi malam pagi dapat laporan ada 18 jenazah Pak yang dikubur bahkan tiap hari rata-rata 15 Pak ada sampai setelah lebaran kemarin 22 Pak. Kasihan dengan tenaga yang pemakaman dan tenaga plus apa untuk pemandian untuk perawatan di rumah sakit. Kami mohon Pak Ganip ini adalah terus terangnya benar-benar gawat di Kudus ini. Jadi kami mohon dari BNPB disampaikan dalam BPBD Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah kaitannya penanganan kasus Covid ini penting sekali. Demikian terima kasih. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Itu enggak perlu kepala BNPB yang jawab. Karena beliau tadi malam telepon saya, beliau karena cepat karena mau ke Kudus habis ini. Jadi saya minta Pak Wahid damping kepala BNPB, jangan minta beliau kesana tapi Pak Wahid juga harus kesana. Jadi memang Kudus menjadi fokus BNPB. Banyak kali, oo di wakili satu baris satu orang. Oke Pak Samsu Niang.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi dan Kepala BNPB dan seluruh jajarannya.

Perkenalkan nama saya sama dari pemilihan Sulawesi Selatan 2 dari Fraksi PDIP Perjuangan. Mungkin saya belum masuk materi apa yang tadi Pak Jenderal tadi sampaikan walaupun dari awal kami melihat bahwa Bapak sudah menjelaskan secara komprehensif dalam pendekatan holistik terkait dengan BNPB dan saya yakin Bapak sudah paham dan sudah mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk penanganan bencana ke depannya. Cuma barangkali harus saya bawa ke depan ini sebagaimana Kepala BNPB sebelum-sebelumnya itu ada kemitraan yang harmonis antara BNPB dengan Komisi VIII. Ini yang perlu barangkali diperdalam supaya ke depan kita ini bersinergi terus dan terus terang Komisi VIII totalitas membantu BNPB selama ini. Harapan kita juga Komisi VIII bisa kerjasama dengan komisi VIII dalam rangka kerja-kerja mereka dalam rangka penuntasan kebencanaan di lapangan. Itu barangkali perlu saya stressing yang perlu barangkali stressing kepada Pak Kepala. Saya kira pendekatan-pendekatan familiar itu Pak yang paling bagus kepada teman-teman Komisi VII karena dengan seperti itu apa yang menjadi harapan Bapak sebagai kepala bencana tentu kita akan mensupport penuh kegiatan-kegiatan Bapak ini. Jadi sinergitas Pak.

DPR Itu disumpah Bapak kita ini. Sumpah kita memperjuangkan daerah pemilihan. Itu yang harus Bapak paham betul itu. Karena kita disumpah. Kita atas nama sumpah kita memperjuangkan daerah pemilihan, Ini yang bapak harus pahami baik. Itu yang harus dipertegas barangkali perlu diterpertegas supaya ke depan ini enak jalannya begitu. Saya kira demikian Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Saya kira apa yang disampaikan Pak Samsu Niang ini seperti juru bicara oleh Komisi VIII Pak. Jadi dia sudah mewakili semua anggota. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Samsu Niang terutama dapil ini banyak banjir atau bencana, saya kira sangat naif jika komisi VIII tidak bisa menghadirkan sesuatu yang bisa apa namanya yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Satu yang mewakili sini, Bu Wulan. Tadi karena Pak Nurhuda laki-laki, laki-laki nggak adil kalau perempuan Pak.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati dan juga dari BNPB yang hadir.

Sekali lagi, selamat buat Kepala BNPB yang baru, Pak Ganip. Perkenalkan juga saya Wulan Pak setelah dikenalkan oleh Pimpinan.

Dapilnya sebalahan dengan punya pak Wahid. Saya dari Pati. Nah sebenarnya juga hitam juga sih sebenarnya tapi hitam agak kelabu begitu lho. Terima kasih jadi untuk mengingat jadwal kita 7, 8, 9 besok saya harap bahwa nanti data-data yang disiapkan itu secara rinci jangan sampai nanti ada yang ketinggalan atau apa. Dan yang lebih penting lagi nanti harapan kita semuanya pastinya data itu beberapa hari sebelumnya sebelum pelaksanaan sudah ada di kita semuanya. Jadi kita enak dalam mempelajarinya bukan baru-baru langsung kita buka di dalam tanggal itu tetapi kita sudah tahu isinya. Demikian juga yang disampaikan Pak Samsu tadi perhatikan poin-poin mana yang kita bisa apa bawa ke dapil sebagai sumpah kita sebagai anggota untuk memperjuangkan dapil nanti bisa terlihat di situ. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira itu bagus sekali. Nanti dari pihak BNPB berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VIII Pak menyiapkan bahan sehingga kami terima sebelum pendalaman. Ya bukan gitu Pak Lilik ya? Pak Arwan Aras, oh belum terwakili juga kan sama-sama PDIP, kan sudah diwakili Pak Samsu Niang? Ya silakan-silakan

F- PDI PERJUANGAN (H. ARWAN M. ARAS T., S. Kom.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya karena waktunya Cuma sebentar Pak Ketua. Jadi kita langsung saja ya ini mengenai terkait kebencanaan di Sulawesi Barat Pak Dana DTH itu masih banyak yang belum tersalurkan. Kemudian dana stimulan yang kemarin telah disampaikan atau disalurkan oleh Pak Doni juga itu ada beberapa kendala di sana Pak. Ini sangat-sangat saya sayangkan karena seolah-olah BNPB ini lepas tangan setelah menyalurkan tidak ada koordinasi yang baik lagi di daerah bagaimana sebenarnya penyaluran itu Pak? Masyarakat ini banyak yang sekarang bertanya kepada saya. Kok saya belum masuk pendataannya? Lantas dijanjikan lagi nanti tahap kedua.

Nah sekarang saya juga mau bertanya siapa yang dari BNPB yang menjanjikan tahap kedua dan bagaimana prosedur nya nanti Pak. Jangan sampai janji ini membuat masyarakat kata menunggu atau cuman di apa supaya tidak meminta-minta kayak gitu lagi pak ini perlu Pak. Kemudian ke depan juga saya minta BNPB ini berkoordinasi atau memberikan Bimtek lah kepada BPD Daerah bagaimana sebenarnya penyaluran bantuan ini. Banyak BPBD nya kita belum paham termasuk pemda sehingga kacau di daerah ini terutama yang dialami masyarakat Sulawesi Barat sekarang hari ini. Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Betul Pak Kepala. Pak Awan Aras ini Pak, dapilnya Sulbar yang gempunya yang luar biasa kemarin dan tentu masih banyak persoalan yang perlu diatasi ya? Pak Nurhuda?

F- PKB (M.F. NURHUDA Y):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Ganip Warsito Kepala BNPB yang saya hormati.

Saya ucapkan selamat pagi yang telah dilantik menjadi Kepala BNPB menggantikan Pak Doni.

Kepada Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan anggota DPR RI Komisi VIII yang saya hormati.

Singkat saja Pak kalau tadi Pak Wahid dan Bu Wulan mengatakan daerahnya itu hitam dan mungkin kelabu itu. Alhamdulillah Pak di dapil kami di Pekalongan kami kemarin ketemu sama Pak Bupati ditampilkan itu zonanya hidup berdasarkan dari apa evaluasi dari Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan tuh terendah nomor 2 Kota Pekalongan pada nomor 1. Nah 1 karena PKB disana dapat 2 Pak nanti kalau dapat 3 mungkin hijaunya royo-royo Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau Golkar yang menang itu berarti kuning ya?

F- PKB (M.F. NURHUDA Y):

Ya betul Pak. Kemudian singkat saja dari di daerah kami itu di Kota Pekalongan sama di Kabupaten Pekalongan bencana itu setiap tahun terjadi bahkan di tahun 2020 kemarin itu selama 4 bulan dalam satu tahun itu terjadi banjir terus Pak. Dan banjir ini bukan karena sungai bukan karena apa tapi karena rob Pak. Dan itu terus. Setiap hujan itu masyarakat sudah was-was. Sekarang itu kalau kalau di berbagai tempat itu ada namanya peninggian jalan. Tapi peninggian jalan itu berdampak pada rumah-rumah disamping kiri kanan itu berdampak sehingga mereka yang terjadi rumahnya itu apa lantainya ditinggikan Pak. Tapi rumahnya nggak tinggi-tinggi sehingga mereka itu rumahnya semakin hari semakin pendek. Kebanyakan orang itu renovasi rumah itu rumahnya semakin tinggi tapi karena terdampak banjir akhirnya mereka justru renovasi rumah itu rumahnya semakin hari semakin pendek.

Mohon nanti di perhatikan para terjadi hampir setiap tahun itu hampir pasti ada lima persahabatan di Kota Pekalongan Kecamatan Pekalongan Utara dan Barat, kemudian di Kabupaten Pekalongan itu ada di Kecamatan

Wonokerto, Siwalan sama di Kecamatan Wiroseso. Nah itu saja Pak yang mungkin akan sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih dari BNPB telah memberikan perhatian ke sana dan datang ke sana. Terima kasih kurang lebihnya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Bearti memang betul tadi praduga saya, yang yang diwakili oleh Pak Samsul betul semuanya mewakili dapil kan. Semuanya diwakili Pak Samsu Niang kan. Pak Rudi silakan Pak.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih. Ketua, wakil ketua dan kepala BNPB. Saya hanya mengingatkan Pak. Rapat Kerja Evaluasi Anggaran 2020 2021 dan pendahuluan RAPBN saya sudah dengarkan baik-baik Pak. Paparan Pak Kepala. Tapi saya ingin bertanya dan sedikit memberi saran Pak Bapak dari menjelaskan kan dari pagu indikatif 2020. Bapak jelaskan dari program dukungan manajemen, program ketahanan pangan lalu di bawah item itu kan ada RMPNBP PLN Pak. Itu harusnya Bapak jelaskan Pak. Jangan dilompat-lompati Pak. Karena ini kan rapat kerja evaluasi Pak begitu. Kami kan juga bingung bapak lompat-lompati ke jumlah total. Karena kan 2020 Bapak baca capaian kinerja prioritas.

Contohnya desa tangguh bencana 120 lokasi Pak. Kan harusnya detail Pak lokasinya di mana? Apakah di Sulawesi tadi? Apakah di Sumatera? Atau di Banten Pak ha dimana begitu jangan dilompat-lompati dan harus ada angkanya Pak begitu. Karena kalau seperti ini ini main-main saja. Ini bukan evaluasi anggaran, ini kalau versi disini apa namanya it uke depan apa namanya Pak Samsu Niang, isu-isu aktual. Ini bukan evaluasi anggaran kalau Bapak enggak pakai angka ini isu aktual. Jadi saya minta melalui sekjennya ini harus ada angka nanti lho Pak, nanti bahas di Kopo. Harus jelas berapa yang dihabiskan. Harusnya ada evaluasi tri wulan, per enam bulan. Saya udah sering tanya terus sama Pak Doni karena dia banyak sering gambarnya di layar, nah ini anggaran buat nyalon atau apa saya pikir begitu Pak. Nah itu juga 2021 seperti ini sama, Bapak lompati ini staf Bapak hanya dua angka program ketahanan bencana dan manajemen. Tak ada rinciannya lagi Pak. Evaluasi ap aini begitu, tahu-tahu realisasiny 28% dan 27. Nah ini apa maksudnya kita mengevaluasi apa, mana Bahasa judulnya enggak ad aitu. Ini masukan ke Pak Kepala. Terima kasih saya kembalikan ke Ketua.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi kalau masalah anggaran kita perdalam di itu ya? Di pendalaman secara serius dari pagi sampai malam, malam lagi boleh.

ANGGOTA KOMISI VIII:

Sedikit Pak Ketua, sebelah kiri.

KETUA RAPAT:

Sebelah kanan juga banyak Bu. Pak Jefry baru datang ini. Ntar Bu ya?

F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Bismillahirrahmannirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi VIII dan juga Pak Jenderal Ganip beserta rombongan.

Perkenalkan Pak saya dengan Jefri Romdonny dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar 9 yang meliputi Sumedang-Majalengka-Subang. Saya ucapkan selamat kepada Pak Jenderal Ganip atas Amanah barunya. Semoga kerja sama kemitraan antara Komisi VIII dan BNPB ke depan itu semakin baik. Saya mungkin singkat juga terhadap terkait penyiapan materi. Ini mungkin saya amati di mana sebelumnya kami sudah menerima materi via WhatsApp yang berupa *softfile* tapi kemudian apa yang kami lihat di sini ada sedikit perbedaan ini pada realisasi anggaran tahun 2021. Ini sekedar maksudnya supaya kalau menyiapkan bahan itu tidak berbeda-beda ya? Di sini di program ketahanan bencana tertulis persentasenya 28,66 dengan realisasinya sekitar 901 miliar sedangkan di bahan sebelumnya ini kami lihat realisasinya hanya sekitar 255 miliar saja dengan total persentase 8,3%. Mungkin itu koreksi dari saya. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini dapat WA-nya kapan? Kapan? Tadi, atau kemarin malam? Kalau minggu lalu memang banyak pembayaran BNPB. Nah Ibu Ina. Tapi mohon waktunya diperhatikan ya?

F- PDIP (INA AMMANIA):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, serta Kepala BNPB jajarannya.

Saya singkat saja sesuai dengan arahan Pak Ketua. Sepakat pendalaman anggaran dibahas. Saya hanya ingin, menyampaikan keadaan dapil saya Pak, saya dari Jatim 7 Ngawi, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan. Bahwasanya di Ngawi itu ada 13 desa yang selalu kebanjiran karena ada luapan dari kali yang ada di Solo. Tahun 2022 sudah dianggarkan dan sudah direncanakan untuk dibuat tanggul. Oleh sebab itu saya mohon kepada bapaknya untuk bisa jumlah membantu menyampaikan Kementerian PU PR seyogyanya tahun 2022 ini bisa dilaksanakan.

Dan yang kedua Pak sesuai dengan MD3 kita bahwa adanya pengawasan ya Pak ya. Saya minta indikator daripada program-program yang sudah dimasukkan di dalam rancangan BNPB untuk kita konsinyering karena biasanya untuk di daerah, itu tidak sama dengan apa yang kita rapat di Komisi VIII. Oleh sebab itu nanti tolong dalam pendalamannya sebagai anggota dewan, daerah-daerah mana yang sudah dianggarkan program-programnya sehingga kita ketika kita di daerah kita sama-sama mengawasi nya Pak. Itu saja. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Masih mau lanjut nih? Pak Ahmad habis itu Pak Kyai Muslich, cukup ya?

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

Pimpinan beserta anggota yang saya hormati baik fisik dan virtual

Tentunya Kepala BNPB yang baru Bapak Ganip Warsito. Letnan Jenderal, aktif ya Pak ya? Selamat Pak menjadi mitra kami yang terbaik.

Pertama informasi, Riau merah nomor rangking satu tiga hari yang lewat Pak. Merah tiga hari yang lalu. Covid ini. Jadi mohon pengertian dari BNPB Riau sekarang posisi nomor 3 Pak. Jadi hari-hari itu sekitar.

KETUA RAPAT:

Yang menang PDIP atau siapa sampai merah?

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Merah pekat sekarang Pak mohon perhatian.

Yang kedua in ikan musim kemarau Pak. Jadi Riau itu terkenal kebakaran hutannya. Jadi kami mohon bulan-bulan ke depan ini untuk BNPB masalah Karhutla untuk Riau. Karena masalah hutan disana sering terbakar dan memang sangat memerlukan helicopter untuk menyiramnya. Jadi bulan ini bulan depan.

Yang ketiga, mengenai dana KSP Pak. Jadi kami tolong dari apa namanya BNPB diberitahu Pak mana *mapping* daerah-daerah yang kena bencana itu. Jadi tatkala bencana itu datang itu tidak mengurus administrasinya lagi. Ini pengalaman kami Pak takala terjadi bencana itu bukan belum masuk dana KSP sana belum ditetapkan. Jadi mengurus SK Bupati nya, penetapannya panjang prosesnya sedangkan itu masyarakat perlu dana itu. Jadi tolong dari BNPB itu *mapping* Pak, daerah rawan bencana itu dan tetapkan sekali bahwa daerah itu daerah KSP. Sehingga waktu terjadi tinggal mencairkan dananya tidak mengajukan memproses ya jadi KSP begitu. Ini yang kita alami. Jadi kalau misal 2020/2021 yang semester terakhir ini tolong mappingkan daerah rawan bencana nasional itu bakal terjadi bencana alam yaitu langsung dana ini drop, tidak mengusul ini lama nunggu Pak berbulan-bulan tidak ditetapkan kalau tidak ditetapkan KSP nya tidak bisa cair kan sementara masyarakat sangat membutuhkan ini yang kami alami Pak. Jadi kami kira itu saja Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Achmad dari Demokrat, terakhir Pak Kyai Muslich kami persilakan dari PPP.

F- PPP (K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Kepada Bapak Pimpinan dan Para Wakil Ketua;
Anggota Dewan kami muliakan.
Bapak Letjen Ganip Warsito, Kepala BNPB yang baru.

Semoga diberi kekuatan lahir batin untuk menyelesaikan bencana di Indonesia ini. Perlu kita sampaikan bahwa Dapil VI Jateng, ini hanya mengingatkan saja Pak. Semoga Bapak tahu daerah bencana juga. Sekarang Kabupaten Magelang dengan gunung merapinya ini sudah mulai kentut-kentut ini. Kemudian Purworejo, Wonosobo ini juga daerah longsor. Terutama yang kita sampaikan untuk persiapan jadi tapi kemarin sore untuk Gunung Merapinya sudah mulai kentut-kentut. Kalau asli saya Tegalrejo Pak, Tegalrejo Magelang, batuk-batuk, kentut itu. Ini kemarin kok kelihatannya

semoga nggak jadi saja ini perlu kita sampaikan dan sesuai masih suasana lebaran kami belum resmi minta maaf jadi minal aidzin wal faizin wal makbulil, amin ya rabbal alamin. Sekian.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

ANGGOTA KOMISI VIII:

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau laporan dapil sama Pak Lilik saja cukup itu. Ya. Minta nomornya Pak Lilik itu, Bu Tati, Bu Shinta siapa itu. Kalau dapil supaya nanti ingat begitu lho Pak. Sekali lagi saudara-saudara ku atau Bapak Ibu, kita akan membahas secara mendalam itu *questionaring* di Kopo pagi sampai malam dan itu kita tuntaskan semuanya karena in ikan pen gantar begitu lho. Nanti kita akan bahas secara serius nanti ya. Saya kira cukup ya mungkin nanti kita sambung di tanggal 8 ya? Hah? Tanggal 8, 7-8-9, BNPB jadwalnya tanggal 8, tanggal 7 itu setahu saya Kemenag, tanggal 8 BNPB tanggal 9nya Kementerian PPPA dan Kemensos tanda tanya karena datanga belum jelas. Ya oke dua menit Bu Lisda, dua menit Pak HBA.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M. Tr.):

Baik Pak Pimpinan, langsung saja Pak Ganip. Karena ini suara dapil ya saya langsung saja juga. Bahwa saya melihat adanya.

KETUA RAPAT:

Tapi ini Raker bukan laporan anggaran hari ini.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M. Tr.):

Revisi anggaran kalau yang masalah anggaran nanti akan dibahas Pak Ketua. Nah jadi ini menyampaikan suara dapil saja Pak Ganip. Kami melihat disana ada selisih sampai dengan 900 miliar yang belum terpakai. Artinya walaupun itu sudah dikategorikan sangat bagus ya 92,9 % serapan anggaran tapi kami berharap dengan banyaknya angka kebutuhan di daerah Pak seperti misalnya di tempat kami ada satu kecamatan Rahul yang desanya itu

setiap ini banjir terusnya. Jadi kalau ada anggaran itu bisa dimanfaatkan sehingga tahun-tahun depan mereka tidak akan kebanjiran lagi. Mungkin itu saja ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Sekali lagi kalau masalah detail banjir saya kira Pak Ganip pusing saya juga pusing. Mengingat itu disini banjir sini longsor. Nanti sampaikan kalau bisa tertulis Bapak Ibu ya tertulis di sampaikan ke BNPB pasti juga tidak akan bisa ditindaklanjuti semua tapi itu aspirasi yang bisa kita sampaikan. Pak HBA silakan.

F- P GOLKAR (Drs. H. HASAN BASRI AGUS M.M.)

Baik, terima kasih Pak Ketua. Dua hal saja yang ingin disampaikan saya sudah rapat dengan Kepala BNPB di Jambi Kepala Badan di Jambi kemarin begitu saya dipindahkan ke Komisi VIII. Pertama harapan dia dulu pernah Aceh waktu tsunami meminjamkan tenda ke Jambi BNPB Jambi. Waktu itu dipenuhi dan janji sampai sekarang mau di waktu itu mau diganti. Sampai sekarang belum ada penggantian. Itu satu. Yang kedua, kemarin kami ngecek langsung makanan siap saji Pak, ternyata ada yang sudah expired ada yang lewat waktu. Kadang-kadang pengirimannya terlalu lambat mendekati hampir habis baru dikirim. Dan sangat minim sekali untuk 11 provinsi kabupaten kota termasuk Jambi. Misalnya alat-alat masak itu cuma dua unit atau apa ini dua box. Jadi tidak apa cukup jadi sangat minim sekali dan kami mengerti bahwa anggaran kita refocusing dan sebagainya. Mungkin kalau mungkin tidak mungkin bisa dikirim hanya sekedar memenuhi satu dua tiga saja untuk apa begitu kan? Kita kan ada 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dua itu saja Pak salam dalam saya sepakat dengan Pak Ketua Komisi nanti tanggal 8-9 kita akan mendalami. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasan Basri Agus dari Jambi dari Golkar.

Baik, Bapak Ibu saya kira Pak Kepala BNPB Pak Ganip hampir semua menyampaikan isu aktual di daerah masing-masing Pak saya kira staf bapak sudah catat itu intinya begitu perhatiannya pejuang-pejuang rakyat ini Pak. Maksudnya di Komisi VII BNPB, kalau aspirasi itu nihil tidak sama sekali di perhatikan. Nah kalau masalah anggaran tadi kita sepakat, tadi saya baru diingatkan dari Sekretariat, Pak Ganip beserta seluruh jajaran itu BNPB itu hari Senin Pak tanggal 7. Saya ralat tanggal 8 Juni. Ini tanggal 7 yang saya

pegang sekarang. Baik mungkin ada yang disampaikan Pak Ganip yang kita masuki tahap kesimpulan, kami persilakan Pak Ganip.

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VIII.

Saya ingin menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan, saran masukan dan harapan dari Bapak Ibu sekalian.

Yang pertama, untuk Pak Wahid saya izin Pak siang ini saya akan berangkat ke Kudus. Karena memang kondisinya seperti yang tadi Bapak katakan sehingga saya perlu berkoordinasi dengan Pak Gubernur dengan Forkopinda Semarang, Kudus, kami akan melaksanakan dengan Forum Forkopinda dengan Kudus dengan melakukan intervensi Pak dan memberikan bantuan bahkan assessment kemungkinan untuk mendirikan rumah sakit di lapangan, pembentukan tenaga medis dan alat masker . Kemudian hal-hal yang dibutuhkan disana. Insyaallah kedatangan kita bisa mengurai kesulitan yang selama ini dihadapi oleh Pemda. Terima kasih Pak atas dukungannya, mohon doanya supaya besok kita bisa berjalan lancar. Dari sana Pak saya juga akan menuju ke Cilacap saya akan meninjau yang sana dan prioritas di Cilacap itu nanti kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkes dan TNI Polri untuk vaksinasi Pak hari Jumat dan Sabtu di Cilacap nanti. Itu juga bagian dari kita mencegah lonjakan Covid yang kita sama-sama ketahui.

Kemudian untuk Pak Samsu Niang dan juga untuk Bapak Samsu Niang, mohon maaf Pak masih baru kita belum hapal itu. Kami ucapkan terima kasih Pak justru apa yang disampaikan itu juga menjadi harapan saya selaku pejabat baru. Jadi sinergitas, harmonisasi dalam kemitraan ini perlu untuk ditingkatkan Pak. Bahkan saya merencanakan untuk para deputi nanti mendampingi atau mengawal itu atas suatu harapan Bapak. Dari apa yang Bapak lakukan maka saya akan tindak lanjuti.

Yang berikutnya dari Bu Wulan juga sama ini untuk menyikapi kerja sama ini yang ditingkatkan.

Yang selanjutnya untuk Pak Arwan kebencanaan di Sulbar Pak ini memang ketika bencana juga saya mendampingi waktu Panglima TNI juga berkunjung disana Pak. Banyak memang hal yang perlu kita tangani dan sampai sekarang pun perlu kita memberikan pendampingan, bantuan untuk penyelesaian masalah disana. Terkait dengan dana yang tadi sudah diserahkan oleh BNPB seperti di koreksi tadi nanti kita akan kawal dengan tepat. Karena prinsip bencana kan cepat tepat sesuai sasaran itu salah satunya. Nah untuk penyerahan DTH kepada korban terdampak gempa Sulbar sebanyak 5000 per KK untuk khusus rumah rusak berat itu Pak. Kemudian untuk stimulan rumah rusak sedang terproses ini sedang berproses untuk pembukaan rekening di bank. Untuk Kabupaten Mamuju ada

Rp.209.535.000.000. Kemudian untuk Kabupaten Majene 123.220.000.000 dan untuk Kabupaten Mamasa 9.420.000.000.

Tambahan terkait tahap satu dan dua intinya BNPB akan menindaklanjuti jika ada usulan dari daerah. Namun sampai sekarang usulan tahap dua belum disampaikan ke PPAD ke BNPB. Tapi kami akan proaktif nanti Pak Deputi III mungkin bisa proaktif menjemput ini karena masyarakat kan menunggu begitu. Kita terima kasih Pak. Kemudian untuk harapan dari Pak Arwan kebencanaan selanjutnya adalah Bimtek untuk BPBD. Kita juga mempunyai program itu mungkin nanti kita akan prioritaskan untuk daerah-daerah yang betul-betul memang.

KETUA RAPAT:

Tapi Pak Ganip saya usul Pak kalau ada Bimtek atau apalah namanya mungkin dari Komisi VIII yang dapilnya ada itu Pak bisa jadi narsum itu Pak. Itu bisa aktual dan lebih interaktif Pak.

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Terima kasih Pak Pimpinan. Kita terima Pak nanti kita libatkan untuk bimtek itu. Untuk Pak Nurhuda Dapil Pekalongan menjadi atensi Pak apa yang Bapak sudah sampaikan. Kemudian Pak Rudi Hartono terima kasih Pak koreksi dan masukannya mohon maaf bukan bermaksud untuk main-main tapi kami akan dalam nanti di dalam pendalaman dan juga untuk koreksi ke depan saya akan sesuaikan dengan arahan dan masukan dari Bapak tadi. Terima kasih tadi.

Kemudian Bapak Jeffry penyiapan materi ya Pak? Sama akan menjadi perhatian kita untuk nanti. Mungkin kita perlu cari solusi nanti sumber terpercaya ini. Karena kan ada dari bocoran atau hal yang tidak resmi jadi mohon maaf nanti kita akan perbaiki Pak bedanya jauh banget ini. Terima kasih banyak. Untuk Ngawi, banjir PUPR. Untuk program-program pendalaman untuk daerah yang mendapat ini.

Kita, intinya Pak Pimpinan apa yang sudah menjadi masukan ke saya selaku Kepala BNPB yang baru menjadi atensi dan akan saya tindaklanjuti Pak dan mungkin kedepan masih banyak lagi Pak diberikan masukan kepada kami. Kami juga akan menindaklanjuti untuk itu karena sebenarnya kami adalah pelaksana lapangan dari harapan Bapak Ibu semua menjadi wakil rakyat dari daerah. Dan tentunya saya yang melakukan selaku Kepala BNPB dan jajaran. Insyaallah kita semua akan jalankan Pak. Terima kasih, mungkin ini yang perlu saya sampaikan sebagai jawaban dan penegasan dari saya untuk menerima apa yang menjadi atensi dan masukan dari para Pimpinan dan Anggota Dewan. Terima kasih Bapak Pimpinan, saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Ibu itu jawaban dari Kepala BNPB. Intinya kita perdalam dulu nanti di Kopo Pak baru nanti kita Raker lagi kan. Nah itu, dari pendalaman itu saya kira sedetil-detilnya kita benar-benar pelototi apa yang menjadi harapan kita karena waktunya panjang dan nanti setelah dari sana kita akan bawa ke Raker.

Baik, Bapak Ibu terhadap aspirasi dapil tadi saran saya tertulis Pak. Ya tertulis, disampaikan masing-masing anggota supaya bisa terdeteksi atau terdata di BNPB karena kalau lisan begini kadang-kadang lupa atau sengaja dilupakan Pak Samsu Niang. Kalau bisa tertulis ya Pak Ya.

Baik, Bapak Ibu Kepala BNPB beserta seluruh jajaran. Kita sudah memasuki tahap agenda berikutnya yaitu kesimpulan mohon ditampilkan.

Baik Bapak Ibu Anggota yang kami hormati.

Dari meja pimpinan saya akan membacakan draf kesimpulan. Mohon nanti dikoreksi baik dari sisi makna maupun redaksi. Sebelum kita ambil sebuah kesimpulan Rapat Kerja pada pagi hari ini.

Draf Kesimpulan
Rapat Kerja
Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021
Rabu, 2 Juni 2021

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB dengan agenda membahas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP Tahun 2022, evaluasi pelaksanaan antara tahun 2020 dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun 2011 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima pagu indikatif dari Menteri Keuangan maksudnya ya. Tahun 2022 sebesar Rp.1.127.245.197.000 dengan rincian terdiri dari:
 - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp.289.010.347.000.
 - b. Program ketahanan bencana sebesar Rp.838.234.850.000 pembicaraan lebih lanjut mengenai pagu indikatif BNPB Tahun Anggaran Rp2.000 akan dibahas dengan Eselon I BNPB tanggal 7 Juni 2021. Jadi pendalamannya.
2. Komisi VIII DPR RI meminta BNPB untuk menyampaikan laporan penggunaan dana siap pakai tahun 2020 secara rinci dan transparan mengenai alokasi dana yang digunakan untuk penggunaan apa saja serta disebar ke mana saja.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk meningkatkan realisasi anggaran tahun 2021 yang baru terserap sebesar Rp.977.996.863.499

atau 28,54% dari pagu anggaran BNPB tahun 2021 sebesar Rp.3.427.028.467.000.

4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut:
 - a. Mendorong BNPB untuk memperhatikan daerah-daerah yang masuk zona hitam atau memiliki angka penyebaran Covid-19 yang tinggi seperti Kudus, Pati, Riau, dan lain-lain. Sebagaimana tadi disampaikan oleh banyak para anggota.
 - b. Meminta BNPB untuk memperhatikan penanggulangan bencana di daerah pemilihan anggota Komisi VIII DPR RI sebagaimana amanat undang-undang bahwa Anggota DPR RI wajib memperhatikan daerah pemilihannya.
 - c. Memastikan agar setiap bantuan yang disalurkan oleh BNPB ke daerah-daerah rawan bencana untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang jelas.
 - d. Mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Yang tadi saya katakan nomenklatur BNPB yang dihilangkan itu Pak dan itu memang betul-betul dihilangkan Pak kalau pengantar dari pemerintah ya. Tapi Komisi VIII tetap bertahan Pak. Ya, supaya BNPB bukannya saja dipertahankan tapi diperkuat.

Baik, dari para anggota ada yang disampaikan? Dari meja pimpinan? Cukup?

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Izin Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak.

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Yang terkait dengan rekomendasi yang keempat poin A itu terkait dengan konteks penanganan Covid zona hitam diganti zona merah.

KETUA RAPAT:

Zona hitam enggak kelihatan ya? zona merah.

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Siap.

KETUA RAPAT:

Ini karena PDIP Jawa Tengah merah semua katanya. Iya betul zona merah. Ada lagi Pak Ganip? Yang perlu disampaikan. Oke cukup ya?

Baik, Bapak/Ibu ada perbaikan sedikit dari Kepala BNPB oleh karena itu draf yang saya bacakan tidak saya bacakan kembali saya tanyakan kepada BNPB, kepada para anggota dan Pimpinan apakah draf yang saya bacakan sudah mengalami perbaikan bisa kita setujui sebagai kesimpulan rapat kerja pada hari ini? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Baik Pak Ganip ini 12 kurang artinya kita ada waktu sedikit silakan sebelum saya tutup untuk menyampaikan kata akhir Pak. Silakan saya persilakan.

KEPALA BNPB (LETNAN JENDERAL GANIP WARSITO):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VIII Bapak Ibu Sekalian yang terhormat.

Pada pembicaraan pendahuluan atau rapat pada pelaksanaan rapat hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan sebagai kesimpulan dan juga rekomendasi untuk diperhatikan dan tidak hanya oleh BNPB, saya selaku Kepala BNPB beserta seluruh pejabat di BNPB siap melaksanakan rekomendasi atau petunjuk arah dari Komisi VIII.

Demikian sebagai penutup Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal Ganip Warsito beserta seluruh jajaran. Terima kasih kepada para seluruh anggota Komisi VIII dan para pimpinan para hadirin yang berbahagia. Kita sampai di penghujung rapat kerja tapi yang paling penting catatan tadi Pak Ganip dan bahan yang akan kita bahas di Kopo itu tolong disiapkan Pak Lilik ya? Sehingga nanti para anggota bisa mempelajari dahulu itu untuk kepentingan kita semua pak supaya tidak ada yang tercecer di pembahasan nanti.

Sehingga ketika kita mengambil sebuah pesan itu keputusan kita semua. Sekali terima kasih mohon maaf bila ada kekurangan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin Rapat Kerja ini saya tutup. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.38 WIB)

**Jakarta, 2 Juni 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**